

SKRIPSI

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PELAYANAN
KESEHATAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK**

Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

OLEH

MIRANTI YULIA PUTRI

1610111122

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA PK IV



Pembimbing :

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H

Nelwitis, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK

(Miranti Yulia Putri: 1610111122 : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

Adanya Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perkesmas menjamin adanya hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun dalam praktiknya tidak semua Lembaga Perkesmas dapat menjalankan peraturan di atas faktanya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terdapat hambatan teknis seperti terjadinya overkapasitas sehingga mengakibatkan timbul masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan terhadap Narapidana. Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Perkesmas Kelas II B Solok sebagai Hak-hak Narapidana. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Perkesmas Kelas II B Solok, 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak narapidana Mendapatkan pelayanan kesehatan di lembaga perkesmas kelas II B Solok dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan belum memadai. Pelayanan kesehatan di Lembaga Perkesmas Kelas II B Solok belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana biaya pengobatan yang harusnya ditanggung oleh Negara malah dibebankan kepada narapidana. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana yaitu kurangnya petugas kesehatan dan tidak adanya dokter umum sehingga hanya dapat mengobati penyakit ringan, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana, kurang lengkapnya obat-obatan yang ada di klinik serta tidak memadainya sarana dan prasarana kesehatan dan lingkungan yang buruk, kurang memadai dan tidak layak. Diharapkan kedepannya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana lebih memadai, dengan upaya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi narapidana dan kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Perkesmas Kelas B Solok.